



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 315 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH SELAKU PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN CEK
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembayaran gaji dan belanja operasional perkantoran yang sangat dibutuhkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 perlu menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat yang di beri Wewenang Manandatangani Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
-

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2017 Nomor 360);
15. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
16. Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor:800/3039/SETKOT Tanggal 02 Mei 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Plh Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon APRIES. B.GASPERSZ.S.STP. M.Si NIP: 19770403 199602 1 003 Pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b, selaku Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Cek Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Apabila pejabat yang bersangkutan tidak berada ditempat atau berhalangan, pejabat dimaksud dalam diktum kesatu dapat menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 2 - Mei - 2019



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon di Ambon;
2. Inspektur / Kepala Sekretariat DPRD / Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Kelurahan Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 315 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 - Mei - TAHUN 2019

TENTANG

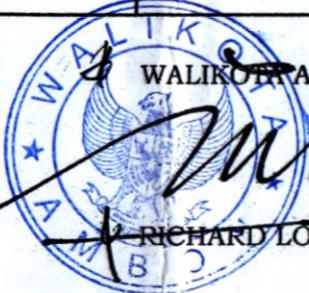
PENUNJUKAN/PENETAPAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SELAKU PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI

SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN CEK

TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Selaku	Tanda Tangan	Paraf
1.	APRIES.B.GASPERSZ.S.STP.M.Si Pembina Tingkat I NIP: 19770403 199602 1 003	Plh.Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon	Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Cek		


WALIKOTA AMBON, *al*

RICHARD LOUHENAPESSY